

# ANALISIS BELANJA MODAL DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGURANGAN DAMPAK KEMISKINAN PADA KABUPATEN PINRANG

*Analysis The Impact Of Special Allocation Fund Capital Expenditure On  
Poverty Reduction In Pinrang District*

**Suriani<sup>1</sup>, Parman<sup>2</sup>**

**Email:** [suaridisuriani@gmail.com](mailto:suaridisuriani@gmail.com)<sup>1</sup>, [parmanfeb@gmail.com](mailto:parmanfeb@gmail.com)<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare  
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi  
Selatan Kode Pos 91131

### Abstrak

Analisis belanja modal dana alokasi khusus terhadap pengurangan dampak kemiskinan pada Kabupaten Pinrang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanaman modal mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Pinrang setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga 2020. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data, ideal, dan penyajian data adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Metodologi penelitian kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah belanja modal untuk pengentasan kemiskinan dari 3 tahun terakhir pada tahun 2018-2020 di Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan dan penurunan. Hasil penelitian dari tahun 2018 mengalami peningkatan 48,45% selanjutnya tahun 2019 mengalami penurunan 32,95 dan tahun 2020 semakin menurun 8,83. Maka dalam hal ini mengenai pengentasan kemiskinan pada Dinas PUPR Kab. Pinrang maka dapat dikatakan tidak berpengaruh secara signifikan dikarenakan pembangunan serta pengadaan dan pengawasan tidak terbagi secara menyeluruh.

**Kata Kunci :** Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Kemiskinan

### Abstract

*Analysis of capital expenditure from special allocation funds towards reducing the impact of poverty in Pinrang Regency. The aim of this research is to find out how investment affects the poverty level in Pinrang Regency every year from 2018 to 2020. Observation, interviews and documentation are the data collection methods used in this research. Data collection, ideas, and data presentation are the data analysis methods used in this research. Qualitative research methodology was applied in this research. The result of this research is that capital expenditures for poverty alleviation from the last 3 years in 2018-2020 in Pinrang Regency have experienced increases and decreases. Research results from 2018 experienced an increase of 48.45%, then in 2019 it experienced a decrease of 32.95 and in 2020 it further decreased by 8.83. So in this case regarding poverty alleviation at the PUPR District Service. It can be said that Pinrang does not have a significant influence because development, procurement and supervision are not distributed as a whole.*

**Keywords:** Capital Shopping, Special Allocation Fund, Poverty

### PENDAHULUAN

Masalah kesejahteraan terkait kemiskinan yang masih mendera sebagian masyarakat harus dikurangi dengan belanja pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mencermati setiap usaha ritel yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Belanja bansos dan belanja modal merupakan posisi terpenting yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan rakyat, sesuai dengan aturan otonomi daerah dan

pengelolaan keuangan daerah. Padahal, belanja bantuan sosial baik materil maupun moneter diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan biaya untuk fasilitas dasar, aset daerah, dan infrastruktur daerah, ditanggung oleh pemerintah daerah melalui belanja modal. Oleh karena itu, tidak mungkin melebih-lebihkan pentingnya kedua kategori pengeluaran ini karena jika diarahkan secara efektif dan meningkat setiap tahun, diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pengurangan tingkat kemiskinan. Juga terkait erat dengan ekspansi ekonomi adalah pengeluaran pemerintah. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang lamban dari waktu ke waktu juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya pada tingkat kemiskinan. Pemerintah pusat masih memberikan dana transfer atau dana perimbangan ke anggaran pembangunan Sulawesi Selatan, yang terus terjadi hingga saat ini. Namun demikian, belanja modal dan sosial, serta laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang, akan menentukan terwujud atau tidaknya rencana belanja yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara langsung dengan menurunkan tingkat kemiskinan.

Sejauh mana pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berdampak pada kesejahteraan masyarakat merupakan masalah yang sering muncul dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, sangat penting untuk menganalisis bagaimana belanja modal, belanja sosial, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Pinrang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK) yang menguraikan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan, menguraikan keterkaitan keuangan antara daerah kabupaten atau kota.

Salah satu faktor kunci dalam menghadapi otonomi daerah adalah kemampuan daerah di bidang keuangan, yang tidak terlepas dari keberhasilan otonomi daerah. Daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang proporsinya lebih kecil, dan PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembangunan dan keuangan merupakan salah satu kriteria mendasar untuk benar-benar mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, masuk akal untuk menjadikan PAD sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan daerah untuk menilai seberapa baik daerah dapat mengelola otonominya.

Pemberian kewenangan otonomi daerah sangat berdampak pada bagaimana pemerintah pusat dan daerah saling terkait, khususnya di bidang administrasi. Desentralisasi dapat dicirikan sebagai penyerahan wewenang atau kekuasaan kepada administrasi publik, perencanaan, dan pemusatan keputusan atau peraturan dalam pemerintahan. Desentralisasi administrasi dan keuangan, yang keduanya menggambarkan ide dan arah kebijakan desentralisasi fiskal, adalah dua dimensi yang menjadi dasar pembentukan daerah otonom. Tingkat kabupaten, kota, bahkan desa semuanya termasuk dalam konsep desentralisasi fiskal ini. Sejak pelaksanaannya, program ini telah memberikan optimisme baru bagi pemerintah daerah dalam upaya mereka untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi kemiskinan di lingkungan sekitar (Daforsa & Handra, 2019).

Menurut Badan Pusat Statistik, Sulawesi Selatan, di pulau Sulawesi, menempati urutan ke-18 di Indonesia atau 8,72 persen. Jika dilihat dari tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan per kabupaten/kota, masih terlihat perbedaan antar daerah. Pendahuluan meliputi informasi tentang konteks topik, masalah yang terkait dengan masalah yang sedang dipecahkan, ulasan atau ringkasan penelitian sebelumnya oleh akademisi lain yang relevan dengan pekerjaan yang dilakukan, serta motivasi dan tujuan implementasi.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dimana data dan informasi diperoleh dari proses observasi, wawancara, dan hasil dari dokumentasi. Setelah data diperoleh tahap selanjutnya peneliti mendeskripsikan secara utuh dan mendalami data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan-keterangan dan kelemahan atau kekurangan dari objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang. Adapun data penelitian diperoleh dari pegawai di Dinas Pekerjaan Umum.

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada anggaran yang memastikan informan dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab tantangan penelitian tertentu. Informan adalah orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang konteks dan keadaan penyelidikan. Pegawai kantor Pelayanan Pekerjaan Umum (PU) merupakan informan yang akan dimintai keterangan. Metode pengumpulan data adalah cara mengumpulkan informasi yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data yang akurat dan data yang sesuai dengan kenyataan, teknik pengumpulan data harus mengikuti serangkaian tahapan yang terencana dan sistematis.

Selanjutnya, pendekatan atau strategi pengumpulan data ini sering digunakan oleh para akademisi untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan konsep abstrak yang tidak memanifestasikan dirinya dalam hal fisik tetapi hanya terlihat dalam penerapannya. Peneliti harus benar-benar terjun langsung dan terbiasa dengan strategi pengumpulan data karena pengumpulan data untuk penelitian dilakukan, misalnya dengan angket, wawancara, observasi, tes atau tes, dokumentasi, dan sebagainya. itu. Validitas atau kebenaran topik penelitian dengan demikian akan diketahui peneliti. Teknik pengolahan data seperti analisis data digunakan untuk mengumpulkan informasi dari kumpulan atau kumpulan data. Ini menunjukkan bahwa tujuan dari proses analitik adalah untuk menghasilkan data yang tidak ambigu. Banyak informasi tidak diragukan lagi disediakan oleh sejumlah besar data bervariasi yang diperoleh. Kemudian, untuk mendapatkan kesimpulan, semua data ini dikumpulkan untuk diproses lebih lanjut. Informasi dapat dikumpulkan dengan menggunakan kumpulan data yang diproses ini.

### HASIL PENELITIAN

Metode transfer pusat yang digunakan untuk membantu desentralisasi kewenangan dan meningkatkan tugas memajukan kepentingan nasional adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) harus disalurkan ke daerah-daerah tertentu yang belum mampu memenuhi standar pelayanan publik nasional yang diharapkan karena berfungsi menjembatani pencapaian standar pelayanan minimum nasional. Di antara daerah yang telah menerima Dana Alokasi Khusus adalah Kabupaten Pinrang. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan, upaya untuk mengurangi dampak kemiskinan dengan memberikan bantuan/subsidi kepada warga yang kurang mampu dan meningkatkan berbagai fasilitas warga/masyarakat seperti jalan, jembatan dan lainnya. Maka dari itu dilihat dari tujuan penelitian ini untuk mengetahui belanja modal dana alokasi khusus terhadap pengurangan dampak kemiskinan.

### PEMBAHASAN

#### 1. Belanja Modal Dana Alokasi Khusus

Agar masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah, pemerintah daerah telah melakukan penanaman modal dalam pembangunan dan modernisasi sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Rakyat harus segera mendapat manfaat dari investasi pemerintah dalam berbagai proyek. Oleh karena itu, dari sudut pandang kepentingan langsung, retribusi dan retribusi lebih relevan daripada pajak. Belanja modal untuk memerangi kemiskinan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang untuk Program Pembangunan, yaitu Pembangunan Jalan untuk Masyarakat Miskin.

- a. Pada tahun 2018 dan 2019 untuk pengentasan kemiskinan terbesar dialokasikan untuk pembangunan jalan menggunakan Rp.15.356.430.000 dari Rp.15.382.000.000 total belanja modal.
- b. Pada tahun 2020 untuk pengentasan kemiskinan terbesar dialokasikan untuk pembangunan jalan menggunakan Rp. 4.525.000.000 dari Rp. 4.525.000.000 total belanja modal.

Tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi kecelakaan, tetapi juga membantu warga Kabupaten Pinrang menghabiskan waktu lebih efektif ketika jalan yang kondisinya buruk diubah menjadi jalan yang layak pakai. Selain itu, pembangunan jalan dan

jembatan memfasilitasi kegiatan ekonomi di Kabupaten Pinrang dengan meningkatkan akses layanan pemerintah seperti pendidikan dan kesehatan.

Perluasan angkatan kerja umum difokuskan pada perbaikan sistem transportasi dasar masyarakat, khususnya sistem jalan. Temuan dari analisis inisiatif pengentasan kemiskinan yang didanai oleh belanja modal APBD Kabupaten Pinrang.

Alokasi untuk program pengentasan kemiskinan di dinas pekerja umum meliputi pembangunan jalan di tahun 2018 ada dua kontruksi jalan yaitu penataan kawasan kumuh lingkungan paleteang 1 kelurahan Temmassaranngge Kecamatan Paleteang (6,07 HA) dan penataan kawasan kumuh lingkungan Marannu Kelurahan Pacongan Kecamatan Paleteang (3,99 HA) dan di daerah ini penduduk miskinnya sebesar 40 655,00 jiwa. Pada tahun 2019 pengadaan kontruksi jalan terdapat 3 program yaitu penataan kawasan kumuh kelurahan Bentengnge, penataan kawasan kumuh kelurahan Penrang dan penataan kawasan kumuh Adanya pembangunan Kelurahan Jaya dan di daerah ini penduduk miskinnya sebesar 377,119,00 dan 2020 terdapat dua program yang di lakukan yaitu perencanaan pembangunan jalan beton Sikkuale-Salipolo dan pengawasan pembangunan jalan Beton Sikkuale-Salipolo dan penduduk miskinnya di daerah ini sebesar 19,543,00 Kemampuan masyarakat untuk mengakses transportasi akan difasilitasi oleh jalan raya, terutama untuk kota-kota pedalaman. Hal ini akan mempermudah mereka untuk membawa hasil produksi mereka untuk dijual, yang akan meningkatkan pendapatan mereka dan, pada akhirnya, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Efek negatif proyek terhadap penduduk lokal dan lingkungan dapat dikurangi dengan meningkatkan jalan raya yang ada. Desa-desa yang paling terpencil akan mendapat keuntungan dari peningkatan jaringan jalan ini berkat desain proyek yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

Transportasi membutuhkan waktu yang lama, sehingga perbaikan jalan terutama pada jalan penghubung antar desa akan mempermudah masyarakat untuk membawa hasil panennya untuk dijual dan dapat menurunkan ekonomi biaya tinggi.

Jika dibandingkan dengan tingkat kehidupan yang lazim di masyarakat setempat, kemiskinan diartikan sebagai rendahnya taraf hidup yang disebabkan oleh kekurangan materi pada sejumlah orang atau sekelompok orang. Kemiskinan memiliki banyak dimensi dan disebabkan oleh berbagai keadaan yang saling berhubungan. Kualitas sumber daya manusia yang rendah, motivasi yang rendah, sikap dalam hubungan keluarga, dan kurangnya pilihan karir yang kreatif adalah semua faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan.

Negara Indonesia telah membuat kemajuan dalam mengurangi kemiskinan, dan strategi pembangunan nasional sekarang memprioritaskan pengentasan kemiskinan di atas segalanya. Rencana kerja tahunan pemerintah (RKP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) sama-sama mencantumkan kebijakan kemiskinan sebagai prioritas. RKP juga memberikan informasi lebih lanjut tentang subjek dan berfungsi sebagai panduan bagi lembaga lokal, negara bagian, dan federal serta kementerian dalam mengembangkan rencana tahunan mereka.

Misalnya, kemiskinan ada di Indonesia karena penduduk setempat memiliki akses terbatas ke pendidikan tinggi. Karena kurangnya tindakan cepat, kemiskinan yang berkembang sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan juga memburuk sebagai akibat dari faktor lain termasuk penyebaran epidemi, bencana alam, dan masalah lainnya.

Di Kabupaten Pinrang, 8,86% penduduk dianggap miskin per Maret 2020, menurut grafik di atas. Naik 1,71 ribu dari Maret 2019 dan naik 0,62 ribu dari Maret 2018 membuat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang menjadi 33,56 ribu pada Maret 2020. Dari situ terlihat, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang terpelihara dengan baik. Terkadang mengalami kenaikan sedikit dan penurunan sedikit.

## 2. Analisis Belanja Modal Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Pinrang

### a. Tahun 2018

Penanaman Modal Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dari total belanja modal 200.000.000, Dinas PUPR Kabupaten Pinrang menggunakan 100%, atau 199.700.000, pada tahun 2018. Pada tahun 2018, pembangunan jalan menjadi penerima investasi modal tertinggi untuk penanggulangan kemiskinan, yaitu sebesar 98,86 persen. Ada dua proyek lagi yang dijalankan dengan tujuan mengurangi kemiskinan selain pembangunan jalan, yaitu penataan kawasan kumuh lingkungan Paleteang 1 Kelurahan Temmassaranngge Kecamatan Paleteang (6,07 ha) dan penataan kawasan kumuh lingkungan marannu Kelurahan Pacongan Kecamatan Paleteang (3,99 ha) kedua program ini menggunakan 48,45 %.

Tidak hanya membantu menekan angka kecelakaan, tetapi juga membantu warga Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang lebih hemat waktu. Hal ini dicapai dengan mengubah jalan raya dengan koneksi yang buruk menjadi jalan yang dapat digunakan.

Menurut temuan penelitian, belanja modal pada tahun 2018 meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan belanja modal untuk pengentasan kemiskinan mengalami pertumbuhan terbesar berdampak pada warga miskin artinya belanja modal dana alokasi khusus ini tidak terbagi secara menyeluruh untuk semua penduduk miskin yang ada di Kabupaten Pinrang dikarenakan jumlah penduduk miskin bertambah dari tahun sebelumnya, hal ini membuktikan belanja modal dana alokasi khusus ini tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

### b. Tahun 2019

Pada 2019, Dinas PUPR Kabupaten Pinrang membelanjakan 150.200.000 dari total 150.500.500 belanja modal, atau 100%, untuk pengentasan kemiskinan. Pembelian pembangunan jalan pada tahun 2019 mendapat penyertaan modal terbesar untuk pengentasan kemiskinan, yaitu sebesar 98,86 persen. Tiga (tiga) program lainnya dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan selain pembangunan jalan, yaitu penataan kawasan kumuh kelurahan Bentengnge, penataan kawasan kumuh Kelurahan Penrang dan penataan kawasan kumuh kel.jaya 32,95 %.

Pengadaan kontruksi jalan akan memperlancar arus transportasi yang selama ini tidak adanya pengadaan kontruksi jalan, maka dengan adanya penataan kawasan di desa akan mempermudah mobilitas masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam adanya pengadaan kontruksi jalan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat dikatakan belanja modal di Tahun 2019 berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan dikarenakan jumlah penduduk miskin berkurang dari tahun 2018 dari tahun sebelumnya, hal ini membuktikan belanja modal dana alokasi khusus ini berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini juga dibuktikan pada penelitian Puspita (2015) dengan judul Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah telah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di jawa tengah.

### c. Tahun 2020

Pada tahun 2020, total belanja modal sebesar \$1,000,000 akan digunakan untuk belanja modal pengentasan kemiskinan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pinrang, atau 16,67 persen atau \$100.000.000. Pada tahun 2020, pembangunan jalan akan mendapatkan persentase belanja modal tertinggi untuk pengentasan kemiskinan (16,67%). Dua inisiatif lebih lanjut dilakukan dengan tujuan mengurangi kemiskinan selain pembangunan jalan, yaitu Jasa perencanaan pembangunan jalan beton sikkuale-salipolo dan pengawasan pembangunan jalan beton sikkuale-salipolo 8,33. Pengadaan kontruksi jalan perencanaan dan Jalan beton sikkuale-salipolo akan memudahkan kehidupan masyarakat di Kabupaten Pinrang berkat perencanaan dan

pengawasan yang matang selama pembangunan. Hal ini terutama berlaku untuk kota-kota pedalaman yang menghadapi masalah akses.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat dikatakan belanja modal di Tahun 2020 tidak ada hal itu membuat jumlah penduduk miskin bertambah dan pesentase kemiskinan juga meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini juga dibuktikan melalui penelitian Apando Ekardo, Firdaus, dan Nilda Elfemi (2014) berjudul Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Irgan Hilir, Kabupaten Selatan, program tersebut telah berhasil mencapai tujuannya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai belanja modal alokasi dana khusus terhadap pengentasan kemiskinan pada Dinas PUPR Kabupaten Pinrang maka dapat dikatakan tidak berdasarkan bagi warga kemiskinan serta pengadaan dan pengawasan tidak terbagi secara menyeluruh di setiap daerah yang membuat jumlah penduduk miskin bertambah setiap tahunnya dan persentase kemiskinan juga meningkat setiap tahun. Maka dari itu hal ini membuktikan belanja modal dana alokasi khusus ini tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Pinrang.

### **Saran**

1. Dinas PUPR perlu menindaklanjuti mengenai pengelolaan belanja modal Dana Alokasi Khusus (DAK) mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan agar tidak terjadi lagi sisa anggaran.
2. Diharapkan kepada Dinas PUPR di tahun-tahun berikutnya dalam penggunaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dilakukan secara efektif dan efisien dibandingkan dengan tahun sebelumnya khusus nya untuk pembangunan dan pengadaan untuk warga miskin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Priyo Hari. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (*Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa Bali*). Jurnal Studi Pembangunan Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga, 2005.
- Adisasmina Rahardjo, 2011, "Pembiayaan Pembangunan Daerah". Cetakan Pertama, Ghara Ilmu, Yogyakarta.
- Arifuddin M, 2015, "Panduan Penulisan Skripsi". Fakultas Ekonomi UMPAR, Parepare.
- Asmani, 2011, "Teknik Pengumpulan Data Penelitian ", Dalam buku V. Wiratna sujarweni, 2015, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, pustaka baru, Yogyakarta.
- Bappenas , Peta Kemampuan Provinsi Dalam Era Otonomi daerah: tinjauan atas kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah, Jakarta, 2003.
- Bastian, Indra, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Erlangga, Jakarta, 2006
- Brata, Aloysius Gunadi, Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004
- Djarwanto Ps, Statistik Sosial Ekonomi, BPFE, Yogyakarta, 2001
- Djalil Rizal, 2014, "Akuntabilitas Keuangan Daerah". Cetakan I, PT INDEKS, Jakarta.

- Darwis, Erstelita Tria Ramadhani. 2015. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang*
- Daforsa, F., & Handra, H. (2019). Analysis of village fund management in poverty alleviation at Pasaman Regency, West Sumatra. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 6(6), 717-728.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang, Tahun 2014.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang, Tahun Anggaran 2015.
- Fatimah, F. (2018). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 1-15.
- Halim, Abdul, 2002. Akuntansi Sektor Publik "Akuntansi Keuangan Daerah", Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah. Edward Tanujaya, Yogyakarta
- Haryani. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007). Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
- Halim, Abdul dan Syukri Abdullah, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI 2003,
- J. M Tedjawati, 2011, "Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan", *Jurnal Pendidikan dan Kabupaten*, Vol. 17, Nomor 5, September 2011". Diakses 11 Februari 2016.
- Meianto Edy, 2014, "Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan luas Wilayah terhadap Belanja modal pada Kabupaten/Kota disumatera Selatan". *Jurusan Akuntansi. STIE Multi Data Palembang*. Diakses 11 Februari 2016.
- Puspita, D. W. (2015). Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jejak*, 8(1).
- Pealeu Marzel Andreas, 2013, "Pengaruh Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012". *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 4 Desember 2013, Hal. 1189-1197. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Universitas Sam Ratulangi Manado. Diakses 28 Februari 2016.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47/PRT/M/ 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur".
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.